

ANALISIS SIKAP POLITIK PARTAI PDIP TERHADAP PEMERINTAHAN PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING PERIODE 2024-2029

Novian Ramadhan¹, Azka Alycia Yahya², Adinda Nazla Rizky³, Santi Mulyady⁴, Fadilah Nur Fakhri⁵, Restu Rahmawati⁶

Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online Juni 2025

2310413008@mahasiswa.upn.vj.ac.id

2310413010@mahasiswa.upn.vj.ac.id

2310413019@mahasiswa.upn.vj.ac.id

2310413020@mahasiswa.upn.vj.ac.id

2310413031@mahasiswa.upn.vj.ac.id

restu.rahmawati@upnvj.ac.id

restu.rahmawati@upnvj.ac.id

restu.rahmawati@upnvj.ac.id

restu.rahmawati@upnvj.ac.id

restu.rahmawati@upnvj.ac.id

restu.rahmawati@upnvj.ac.id

restu.rahmawati@upnvj.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada periode 2024–2029. PDIP, yang sebelumnya mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pemilu 2024, menunjukkan sikap ambigu setelah kekalahan dengan tidak secara resmi bergabung dalam kabinet namun juga tidak menyatakan diri sebagai oposisi terbuka. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan elite PDIP dan data sekunder dari dokumen partai serta pemberitaan media. Hasil penelitian mengungkap bahwa PDIP memilih posisi sebagai "kekuatan penyeimbang" yang bersikap kritis namun tetap terbuka untuk kerja sama pada kebijakan tertentu. Sikap ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti hubungan historis Megawati-Prabowo yang fluktuatif dan resistensi terhadap pencalonan Gibran, serta faktor eksternal seperti tekanan basis pemilih dan konstelasi politik nasional. Implikasinya, posisi PDIP berpotensi memperkuat checks and balances demokrasi namun juga berisiko melemahkan oposisi jika partai ini akhirnya bergabung dengan koalisi pemerintah.

PENDAHULUAN

Pemilu Presiden tahun 2024 menandai fase baru dalam dinamika politik Indonesia dengan terpilihnya pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Dimana kemenangan ini mencerminkan pergeseran konstelasi kekuasaan, di mana poros koalisi besar yang mendukung Prabowo berhasil mendominasi lanskap politik nasional. Dalam struktur baru ini, posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi perhatian utama, mengingat sebelumnya PDIP merupakan partai penguasa yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD dan menjadi partai terbesar di parlemen.¹

Sejak pengumuman resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil resmi pemilu, PDIP menunjukkan sikap yang belum sepenuhnya tegas atau tidak berada dalam struktur kabinet Prabowo - Gibran, tetapi juga belum menyatakan diri secara eksplisit sebagai oposisi formal. Sebagian elite partai, seperti Olly Dondokambey dan Ahmad Basarah, menyampaikan sinyal untuk tetap mendukung stabilitas pemerintahan, sementara figur lain seperti Harto Kristiyanto

¹ Tempo.co. (2024). PDI Perjuangan Dukung Pemerintahan Prabowo.

menegaskan perlunya menjaga prinsip checks and balances dalam demokrasi.² Kondisi ini menimbulkan ambiguitas arah sikap politik PDIP. Di satu sisi, ada hubungan historis yang panjang antara Megawati Soekarnoputri, yang pernah berkoalisi pada pilpres 2009. Di sisi lain, terdapat resistensi internal terhadap Gibran Rakabuming yang pencalonannya dianggap problematik secara etis dan hukum oleh sebagian kader partai. Sikap ini pun menjadi lebih kompleks dengan adanya tekanan dari basis pemilih yang menginginkan PDIP mengambil posisi sebagai oposisi demi menjaga integritas demokrasi.

Secara akademik, sikap politik partai terutama dalam konteks pasca pemilu merupakan bagian terpenting dalam sistem presidensial yang mengedepankan prinsip pemisahan kekuasaan. Dalam konteks ini, peran partai besar seperti PDIP sangat strategis seperti apakah mereka akan memilih bergabung dalam pemerintahan atau justru memperkuat fungsi pengawasan parlemen sebagai oposisi kritis. Studi seperti yang dilakukan oleh Giano Noor Syah Putra (2015) tentang Koalisi Merah Putih menggarisbawahi bahwa oposisi efektif diperlukan untuk menjaga mekanisme check and balances dalam demokrasi presidensial.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana PDIP menyikapi konfigurasi politik baru yang terbentuk pasca pemilu 2024. Mengingat pengaruh signifikan PDIP dalam sistem politik Indonesia, sikap partai ini tidak hanya akan mempengaruhi arah kebijakan pemerintahan Prabowo - Gibran, tetapi juga berdampak pada kualitas demokrasi ke depan. Dengan menelaah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sikap PDIP, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami dinamika partai politik dalam sistem presidensial Indonesia. Serta pentingnya untuk mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor eksternal dan internal mempengaruhi sikap PDIP. Di satu sisi, dukungan terhadap pemerintah dapat memberikan keuntungan yang strategis dalam hal pengaruh legislatif dan akses ke sumber daya. Menjadi oposisi juga dapat membantu PDIP dalam mempertahankan identitasnya sebagai partai yang kritis dan menjaga basis pemilihnya.

RUMUSAN MASALAH

- A. Apa saja yang dapat mempengaruhi sikap politik partai politik PDIP dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming selama periode 2024-2029?
- B. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sikap politik partai politik PDIP?

TUJUAN PENELITIAN

- A. Mengetahui sikap politik partai politik PDIP dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming selama periode 2024-2029
- B. Mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sikap politik partai politik PDIP

MANFAAT PENELITIAN

- A. Memberikan kontribusi pada ilmu politik dengan memperkaya pemahaman tentang peran partai politik dalam sistem demokrasi, khususnya dalam konteks hubungan partai dengan pemerintahan.

² CNN Indonesia. (2025). Ketua PDIP Tegaskan Dukungan ke Pemerintahan Prabowo, bukan Gibran.

- B. Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya peran partai politik dan sistem *checks and balances* dalam menjaga stabilitas demokrasi.

KAJIAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA

2.1 Studi Pustaka

Dalam menganalisis sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming pada periode 2024-2029, penting untuk melihat kajian-kajian sebelumnya yang relevan. Studi pustaka ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika politik di Indonesia, serta bagaimana partai politik berinteraksi dengan kebijakan pemerintahan.

Salah satu referensi yang digunakan adalah penelitian Giano Noor Syah Putra (2015), yang menganalisis sikap politik Koalisi Merah Putih (KMP) terhadap kebijakan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dalam kajian ini Giano menunjukkan bahwa sikap politik KMP terbagi menjadi dua kubu, ada yang menolak kebijakan pemerintah, seperti adanya kenaikan BBM subsidi dan pengukuhan dari Komjenn Budi Guanawan yang ditunda, serta mendukung eksekusi terpidana mati sebagai bentuk kedaulatan negara. Makanya, perilaku KMP itu sama juga dengan gagasan yang ada di politik Islam. Karena KMP disini menjadi oposisi makanya dia menjalankan prinsip dakwah untuk melangsungkan aktivitas politiknya. Dalam temuan ini memberikan konteks yang relevan untuk memahami bagaimana PDIP, sebagai bagian dari kekuatan politik di Indonesia, dapat mengambil sikap yang dinamis sesuai dengan kebijakan pemerintah yang baru. Terbentuknya Koalisi Merah Putih menciptakan hal yang jarang ditemukan di sistem politik yang ada di negara ini. Di kerangka yang ada dalam cara untuk mencapai tujuan presidensial yang dianut negara kita, Gabungan ini muncul sebagai oposisi terhadap pemerintahan. Hal ini layak diapresiasi karena keberadaan oposisi dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah dikritisi secara konstruktif sesuai kebutuhan rakyat. Selain itu, Penguasaan KMP di lembaga parlemen bisa membikin kuat fondasi dalam pembagian kekuasaan (*sharing of power*) dan mekanisme *check and balance*, yang berfungsi untuk pengontrol serta pembatas kewenangan antara lembaga yang ada di pemerintahan. Peraturan yang diambil dari pemerintahan ini jadi hal yang ikut serta dari adanya perjalanan di pemerintahan, dan KMP sebagai power yang menyetarakan satu dan lainnya memiliki tanggung jawab etis dalam mengawasi pemerintah untuk bisa terus berjalan sesuai keinginan bangsa. Dalam tulisannya dia menilai kalo ini hal yang serius buat melihat lebih serius dalam perilaku politik KMP terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah diterapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Naveen Abdul Khalik Musthafa (2012) menggambarkan pentingnya prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dalam mengembangkan sikap oposisi dalam politik Islam. Pandangan ini dapat menjadi acuan bagi PDIP dalam menentukan langkah politiknya sehingga tetap mencerminkan kepentingan rakyat, terutama saat berhadapan dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Masuknya Prabowo ke dalam kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan telah melemahkan kekuatan oposisi di parlemen. Hal ini diperkuat dengan keputusan Prabowo untuk tetap memegang jabatan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, yang secara langsung

mengurangi kapasitas partai tersebut dalam berperan sebagai oposisi yang efektif di DPR. Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat juga menunjukkan kecenderungan untuk mendekati poros politik Presiden Jokowi. Akibatnya, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tetap konsisten menjadi satu-satunya partai oposisi yang berkomitmen untuk bersikap kritis terhadap pemerintah dan koalisinya di parlemen. Kondisi ini melemahkan fungsi pengawasan parlemen, yang seharusnya menjadi elemen penting dalam menjalankan prinsip check and balances. Dengan banyaknya partai yang memiliki hubungan erat dengan pemangku jabatan eksekutif, kapasitas mereka untuk memberikan kritik yang konstruktif terhadap lembaga eksekutif pun menjadi terbatas. Dalam sebuah negara demokrasi, setiap lembaga harus memiliki kedudukan dan peran yang sama kuat serta saling mengawasi dalam kerangka checks and balances. Namun, jika lembaga-lembaga tersebut tidak berfungsi dengan optimal, kinerjanya tidak efektif, atau kehilangan wibawa dalam menjalankan tugasnya, sering kali yang terjadi adalah dominasi partai-partai politik yang rakus atau ekstrem, yang kemudian mengambil alih dan mengendalikan berbagai proses pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dengan mengacu pada berbagai literatur ini, terlihat adanya keterkaitan yang jelas antara sikap politik partai dan kebijakan pemerintah. Hal ini menegaskan pentingnya memahami konteks politik yang lebih luas saat menganalisis posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah yang ada dan memberikan wawasan baru mengenai pengaruh politik PDIP terhadap kebijakan pemerintahan yang akan datang.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syahrul Yudistira yang berjudul sikap politik massa pendukung Habib Rizieq Shihab (studi kasus di Kelurahan Mustika Jaya, Kota Bekasi) bertujuan untuk memahami bagaimana bentuk dan faktor yang mempengaruhi sikap politik dari sekelompok masyarakat yang pernah bergabung pada gerakan aksi bela islam 212. Landasan teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan penelitian berakar pada tiga dimensi utama yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Dimensi kognitif adalah hal yang merujuk kepada aspek pengetahuan dan pemahaman yang didapat individu mengenai fenomena politik. Dimensi afektif adalah merujuk kepada perasaan atau emosi terhadap sistem dan aktor politik. Dimensi konatif menyangkut kecenderungan atau niat individu dalam bertindak secara politik.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan interpretatif dimana data yang terkumpul berdasarkan hasil kuesioner yang disebarikan secara daring kepada warga mustika jaya yang pernah mengikuti aksi 212 dan menyatakan diri pengikut Rizieq Shihab. Sampel ditentukan secara proporsional dengan teknik *multistage random sampling* dan dianalisis menggunakan metode *structural equation modeling* melalui aplikasi smartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kognitif merupakan faktor yang paling signifikan dalam membentuk sikap politik masyarakat dimana warga memiliki pemahaman yang cukup baik terkait isu politik dan lembaga negara meskipun pemahaman mereka tidak diikuti dengan kepercayaan kepada sistem yang ada. Pada dimensi afektif ditemukan bahwa responden secara umum menunjukkan perasaan mendukung pemerintah, tetapi memiliki ketidaksukaan terhadap cara kerja sistem politik yang dianggap tidak

berpihak pada umat islam sedangkan dimensi konatif masyarakat cenderung memiliki sikap selektif terhadap pemimpin dimana preferensi terhadap pemimpin muslim lebih dominan karena diyakini dapat memperjuangkan aspirasi umat islam. Temuan ini menunjukkan adanya kesinambungan antara identitas keagamaan dengan sikap politik serta menunjukkan bahwa residu gerakan politik berbasis agama seperti aksi bela islam masih memiliki pengaruh terhadap preferensi politik masyarakat di tingkat lokal. Penelitian ini memperkaya kajian tentang politik identitas dan kepercayaan politik, serta menegaskan pentingnya memahami dinamika psikologis dan sosial dalam membentuk sikap politik masyarakat pasca gerakan politik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dimas Subekti & Ridho Al-Hamdi (2024) yang berjudul Solidaritas Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Mengusung Anak Presiden di Pemilihan Walikota Surakarta 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan soliditas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam mengusung putra Presiden Joko Widodo dalam pemilihan Walikota Surakarta 2020. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data di penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil temuan dari penelitian ini proses pengambilan keputusan di tubuh PDIP menunjukkan pola yang sangat terpusat pada ketua umum. Hal ini menandakan bahwa struktur organisasi partai cenderung mengarah pada personalisasi institusi, bukan sistem kolektif yang demokratis. Selain itu, tertutupnya dalam mekanisme rekrutmen calon kepala daerah mengindikasikan lemahnya praktik transparansi internal. Ketegangan pun muncul antara pengurus di tingkat daerah dengan elite nasional, yang memperlihatkan disharmoni internal. PDIP juga menghadapi tantangan serius dalam hal kepemimpinan berbasis prosedur, penyelesaian konflik secara institusional, dan kaderisasi yang terstruktur. Dengan kata lain, kesiapan internal PDIP dalam menghadapi Pilkada Surakarta 2020 berada dalam kondisi yang rentan, meskipun tetap disokong oleh ideologi dan loyalitas kader yang kuat.

Fenomena ini menjadi refleksi penting dalam melihat posisi PDIP sebagai partai besar, baik di tingkat lokal Surakarta maupun secara nasional, bahwa dominasi elektoral tidak serta merta mencerminkan kualitas institusional. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian "Analisis Sikap Partai PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran Periode 2024–2029", yang menyoroti bagaimana dinamika internal partai, termasuk soliditas dan orientasi ideologis, turut mempengaruhi sikap politik PDIP terhadap pemerintahan yang kini tidak mereka usung secara langsung. Ketegangan antara prinsip ideologis dan strategi pragmatis menjadi kunci dalam membaca respons partai terhadap konstelasi politik nasional yang berubah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Tri, N. S. (2025) yang berjudul Evaluasi Kinerja 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Kebijakan Nasional. Penelitian ini bertujuan Untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama 100 hari pertama, penelitian ini berfokus pada efektivitas implementasi kebijakan di sektor-sektor strategis, seperti ekonomi, energi, lingkungan hidup, serta hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode expert

judgment yang melibatkan jurnalis dan pakar dari berbagai bidang. Pendekatan ini mengkombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menggali persepsi mendalam dari publik dan para ahli, sedangkan metode kuantitatif dimanfaatkan untuk mengukur dampak kebijakan berdasarkan data statistik dan survei. Data penelitian dikumpulkan melalui survei dan wawancara dengan pakar kebijakan, akademisi, serta jurnalis. Data primer diperoleh dari interaksi langsung dengan para ahli, sedangkan data sekunder berasal dari analisis laporan media, publikasi akademik, dan dokumen resmi pemerintah terkait kebijakan selama 100 hari pertama pemerintahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kementerian, seperti Kementerian Koperasi dan Kementerian Energi, mendapat kritik tajam atas kinerjanya. Sebaliknya, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan mendapatkan penilaian yang baik. Secara keseluruhan, 52% responden menilai tata kelola anggaran kurang memuaskan, dengan isu utama berupa kurangnya transparansi dan intervensi di sektor ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan reshuffle kabinet untuk meningkatkan kinerja kementerian yang kurang kompeten serta reformasi dalam transparansi kebijakan, guna memastikan pemerintahan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.2 Teori dan Konsep

A. Teori Sikap Politik

Sikap merupakan bentuk ekspresi individu yang mencerminkan rasa suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dimaknai sebagai kecenderungan seseorang dalam merespons suatu hal, baik berupa benda maupun individu, yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan atau penolakan (Alisuf, 2010). Menurut Notoatmodjo (2010), sikap adalah respons internal seseorang terhadap suatu stimulus atau objek yang telah melibatkan unsur opini dan emosi, seperti rasa senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, serta penilaian baik atau buruk. Berkowitz (dalam Azhar, 2013) juga menyatakan bahwa sikap mencerminkan dukungan atau ketidak dukungannya terhadap objek tertentu. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap adalah reaksi atau tanggapan seseorang terhadap suatu objek yang bisa bersifat positif maupun negatif, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk rasa setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka terhadap objek tersebut.

Dalam membicarakan sikap terhadap politik, istilah efikasi politik juga bisa dipakai. Konsep ini berkaitan erat dengan teori self-efficacy yang diperkenalkan oleh Bandura (1986), yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghadapi situasi atau menyelesaikan tugas tertentu. Secara lebih spesifik, political efficacy dipahami sebagai keyakinan bahwa tindakan politik yang dilakukan individu memiliki, atau dapat memiliki, dampak terhadap jalannya proses politik (Campbell, Gurin, dan Miller, 1954). Hal ini mencerminkan pandangan individu mengenai sejauh mana dirinya mampu mempengaruhi kebijakan publik (Sellingson, 1980; Cohen et al., 2000; Fox dan Lawless, 2005).

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Political Efficacy

Wu (2003) menyebutkan berbagai hal yang mungkin bisa mempengaruhi tingkat efikasi politik, antara lain:

1) Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang berkaitan dengan efikasi politik. Penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki kualitas pendidikan lebih baik bisa jadi lebih aktif untuk ikut serta kegiatan politik daripada mereka yang memiliki pendidikan kurang baik (Almond & Verba, 1963; Lipset, 1981; Stone & Schaffner, 1998).

2) Informasi Politik

Banyak orang punya pengetahuan tentang kebijakan atau tindakan pemerintah umumnya lebih tertarik dan termotivasi untuk ikut serta aktivitas politik (Bobo & Gilliam, 1990; Stone & Schaffner, 1988).

3) Gender

Berbagai studi menyatakan banyak cowo cenderung suka aktif di dunia politik daripada cewe (Almond & Verba, 1963; Resenstone & Hansen, 1993). Milbrath & Goel (1977) juga menyatakan kalo cowo umumnya memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi untuk terlibat dalam kegiatan politik.

Menurut Azwar (2013), sikap terbentuk dari tiga unsur utama, yaitu:

- a. Komponen kognitif, berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan seseorang terhadap informasi atau pengetahuan yang diperoleh mengenai suatu objek. Salah satu elemen yang bisa di ambil yaitu kepercayaan terhadap Sistem dan Institusi, Pada tingkat makro, sikap politik juga terpengaruh oleh keyakinan individu terhadap kemampuan dan legitimasi pemerintah serta institusi yang ada.
- b. Komponen afektif, merujuk pada reaksi emosional atau perasaan seseorang terhadap objek tertentu. Elemen yang bisa di ambil disini adalah Identitas dan Pengalaman Pribadi, Komponen afektif juga termasuk identitas politik yang terbentuk dari pengalaman pribadi atau kolektif, termasuk pengalaman diskriminasi atau ketidakadilan.
- c. Komponen konatif, menggambarkan dorongan atau kecenderungan individu untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu, yang didasarkan pada pengetahuan dan perasaan yang dimiliki terhadap objek tersebut. Elemen yang bisa di ambil adalah Tindakan Advokasi, Komponen konatif mencakup komitmen untuk beraksi, seperti bergabung dalam demonstrasi, mengikuti pertemuan politik, atau menjadi anggota partai politik. Sikap politik yang kuat dapat mendorong individu untuk aktif berjuang untuk kebijakan yang mereka yakini, seperti advokasi untuk hak-hak sipil.

2.3 Partai Politik

Menurut Budiardjo, partai politik adalah kumpulan individu yang terorganisasi dan memiliki orientasi, nilai, serta cita-cita yang sejalan. Kelompok ini bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan posisi strategis, umumnya melalui jalur konstitusional, guna melaksanakan program yang mereka rancang. Sementara itu, Giovanni Sartori

mendefinisikan partai politik sebagai kelompok politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dan melalui proses tersebut dapat menempatkan para calon mereka di jabatan politik.

Edmund Burke (2005) menjelaskan partai politik sebagai organisasi yang terdiri dari orang-orang yang bersatu untuk memajukan kepentingan nasional bersama, berdasarkan prinsip-prinsip dan kesepakatan yang telah mereka tetapkan.

Menurut Lapalombara dan Anderson (1992), partai politik adalah kelompok politik yang memiliki identitas resmi serta organisasi yang berfungsi menghubungkan pusat kekuasaan dengan tingkat lokal. Kelompok ini terlibat dalam pemilu dan memiliki kemampuan untuk mengajukan kandidat untuk menduduki jabatan publik, baik melalui pemilu yang bebas maupun tidak bebas.

Sigmund Neuman (1963) mendeskripsikan partai politik sebagai organisasi kegiatan politik yang bertujuan menguasai pemerintahan, dengan membangun dukungan rakyat melalui persaingan melawan kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda. Sementara itu, R.H. Soltau (1961) menggambarkan partai politik sebagai sekelompok warga negara yang terorganisasi untuk bertindak sebagai entitas politik. Mereka menggunakan kekuasaan untuk memilih, mengendalikan pemerintahan, dan menerapkan kebijakan umum sesuai dengan tujuan mereka.

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik merupakan kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, dengan tujuan utama untuk memperoleh kekuasaan politik dan menduduki posisi politik melalui cara-cara konstitusional.

Dari konsep yang disampaikan oleh Budiardjo, dapat dilihat bahwa partai politik memiliki berbagai perspektif. Partai politik dipahami sebagai "sarana" atau "alat," yang berarti partai politik dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang positif jika dikelola dengan baik, tetapi dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif jika pengelolaannya tidak optimal. Sebagai sarana, partai politik hanyalah sebuah alat yang bergantung pada bagaimana penggunaannya. Pandangan lainnya adalah bahwa partai politik berfungsi sebagai alat untuk "mengelola negara". Hal ini sejalan dengan fungsi partai politik dalam menyalurkan aspirasi rakyat dan berkontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Budiardjo juga menyoroti bahwa partai politik merupakan "kelompok terorganisasi", dengan menggabungkan pandangan ahli lainnya seperti Hugopian yang menekankan konsep organisasi, dan Ichlasul yang menyoroti konsep kelompok. Dalam pandangan Budiardjo, kedua elemen ini digabungkan menjadi satu konsep, yaitu "kelompok organisasi". Selain itu, orientasi kelompok organisasi ini, menurut Budiardjo, adalah untuk mencapai "kekuasaan politik". Meskipun berbagai tujuan dapat diambil oleh kelompok organisasi, partai politik secara khusus memusatkan tujuannya pada kekuasaan. Hal ini menjadikan partai politik berbeda dari jenis kelompok organisasi lainnya karena fokus utamanya yang selalu bermuara pada kekuasaan.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu proses untuk menentukan perumusan masalah yang akan menjadi panduan dalam penelitian dan akan memberikan gambaran fenomena sosial yang diteliti secara mendalam. Menurut Ahli seperti sugiyono dan Moleong yang dikutip dari pwnwlitian Thalib (2022), pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian sosial yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, dengan mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka serta menekankan kepada makna dan konteks. Konteks ini diyakini bahwa pengetahuan dan pemahaman dihasilkan dari setting sosial dan merupakan suatu proses sosial yang sah.

3.2 Fokus Penelitian

Adalah untuk mengetahui bagaimana sikap politik partai politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto periode 2024-2029 dan bagaimana sikap politik partai politik PDIP mempengaruhi demokrasi Indonesia.

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah pilar utama dalam proses penelitian masalah. Dalam penelitian ini sumber data yang dilakukan adalah wawancara, dimana peneliti akan mengumpulkan informan dan mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh narasumber baik secara tertulis maupun lisan. Adapun sumber data primer yaitu data yang didapat langsung dari narasumber kunci. Sedangkan, sumber data sekunder berasal dari buku, literatur, brosur yang relevan dengan objek penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Tujuan dari hal ini ialah untuk membantu penulis memperoleh data-data yang relevan.

1. Kepustakaan

Pemilihan teknik ini dikarenakan dapat membantu penulis memfokuskan penggunaan teoritis dan mempermudah dalam memperoleh informasi yang sejenis. Sumber pustaka yang digunakan peneliti adalah jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya yang relevan.

2. Wawancara

Menurut Fadhallah (2018) adalah pembicaraan tatap muka dimana salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya. Pihak yang akan peneliti wawancara adalah anggota resmi partai politik PDIP.

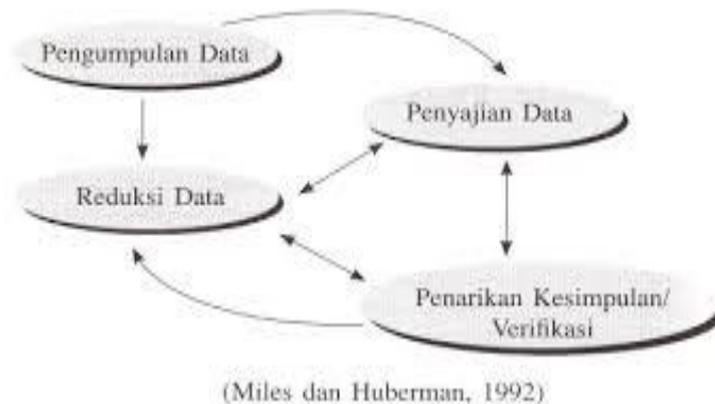
3.5 Teknik Analisis Data

Adalah proses pencarian atau pelacakan pola-pola dengan pengujian sistematis dari sesuatu untuk menemukan dan menentukan kajian serta hubungannya secara keseluruhan. Semua hasil yang didapatkan dari analisis data kualitatif akan membantu penelusuran data melalui catatan-catatan untuk mengidentifikasi pola penelitian.

Teknik pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak mudah dipisahkan. Artinya, analisis data seharusnya dilakukan berbarengan dengan pengumpulan data.

Analisis data mencakup kegiatan memilih data, mengorganisasikan data dan mengaturnya ke dalam unit-unit, mensistensikanya, dan mencari pola kemudian menemukan apa yang penting untuk dipelajari dan dipaparkan dalam laporannya.

Gambar 3.1. Komponen Analisis Data Model Interaktif (Miles dan Huberman)



Penarikan kesimpulan akan dilakukan setelah mendapatkan hasil penelitian, simpulan ini merupakan bagian yang akan menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan dalam jurnal akan disajikan dalam bentuk yang objektif berdasarkan kajian penelitian. Berdasarkan kepada pengumpulan data, pemaparan data, serta verifikasi yang berulang. Analisis data kualitatif adalah upaya yang terus berlanjut untuk menjadikan gambaran keberhasilan secara berurutan.

PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Sikap Politik PDI Perjuangan Terhadap Pemerintahan Prabowo Gibran

Dari hasil penelitian yang dilakukan sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah mendukung pemerintahan Prabowo Subianto namun tetap menolak mengenai kepemimpinan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming. Hal ini disebabkan karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukkan sikap keberatan atas pencalonan gibran Rakabuming.

Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil resmi Pemilu 2024 yang menetapkan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap keberatan atas hasil tersebut. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, secara tegas menyampaikan bahwa proses pemilihan belum selesai karena masih terdapat dugaan berbagai pelanggaran dalam proses pemilu, mulai dari praktik politik uang, tekanan kekuasaan, hingga dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersama partai pengusung Ganjar-Mahfud kemudian menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertanyakan keabsahan hasil pemilu. Di samping itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mengirimkan surat kepada KPU untuk mengawal proses rekapitulasi suara secara lebih transparan. Sikap ini menunjukkan bahwa PDIP tidak serta-

merta menerima hasil pemilu begitu saja, dan masih mengupayakan ruang koreksi terhadap proses demokrasi yang dinilai telah mengalami degradasi integritas.

Di sisi lain, meskipun PDIP tidak mengambil bagian dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, partai ini tetap memainkan perannya di parlemen sebagai partai besar dengan jumlah kursi signifikan. PDIP menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan melalui peran aktif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak pada kepentingan rakyat, serta memberikan kritik terhadap kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi, demokrasi, dan keadilan sosial. Juru Bicara Nasional PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, secara terbuka menyatakan bahwa partainya akan bersikap kritis terhadap pemerintahan Prabowo apabila terdapat langkah-langkah yang menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusional. Hal ini mencerminkan sikap yang tidak asal menentang, tetapi tetap konsisten dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk menjaga jalannya pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak istilah “oposisi” untuk menggambarkan posisi partai, karena menurutnya konsep oposisi lebih cocok dalam sistem parlementer. Sementara Indonesia menganut sistem presidensial yang tidak mengenal oposisi secara formal. Ia menegaskan bahwa PDIP memilih untuk menjadi “kekuatan penyeimbang” yang menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) agar pemerintahan tidak melampaui batas kewenangan dan tetap berada dalam koridor konstitusional. Pernyataan ini diperkuat oleh Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP, yang menjelaskan bahwa meskipun tidak menempatkan kader dalam kabinet, PDIP tetap membuka ruang kerja sama dengan pemerintahan Prabowo sepanjang kerja sama tersebut didasarkan pada kepentingan rakyat dan konstitusi.

Meskipun tidak bergabung secara resmi dalam pemerintahan, partai ini tidak serta-merta menentang semua kebijakan Prabowo-Gibran. Sebaliknya, PDIP memilih untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dinilai sejalan dengan aspirasi rakyat dan prinsip konstitusi, namun tetap bersikap kritis terhadap kebijakan yang menyimpang. Sikap ini tidak hanya mencerminkan konsistensi politik PDIP dalam menjaga integritas demokrasi, tetapi juga menjadi strategi untuk mempertahankan basis pemilihnya yang dikenal kritis terhadap kekuasaan. Dalam konteks sistem presidensial Indonesia, posisi semacam ini menunjukkan bahwa oposisi tidak selalu berarti berada dalam posisi berseberangan secara frontal, melainkan dapat mengambil bentuk pengawasan aktif yang bertanggung jawab demi menjaga jalannya pemerintahan sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi.

4.2 Faktor yang mempengaruhi

Hubungan Historis Politik Megawati Soekarno - Prabowo Subianto
Salah satu alasan utama terbentuknya pasangan Megawati-Prabowo dalam Pilpres 2009 adalah adanya Perjanjian Batu Tulis yang disepakati pada 16 Mei 2009. Dalam kesepakatan tersebut, Prabowo dijanjikan kebebasan untuk mengelola kebijakan ekonomi Indonesia dan menunjuk sepuluh menteri jika mereka terpilih. Pada Pilpres 2009, pasangan ini bersaing melawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto. Pasangan Megawati-Prabowo baru diumumkan pada hari terakhir sebelum pendaftaran ke KPU,

tepatnya pada 15 Mei 2009, setelah melalui proses koalisi yang panjang dan cukup sulit antara PDIP dan Gerindra. Selama kampanye, hubungan keduanya terlihat akrab, misalnya saat masa tenang menjelang pemungutan suara, di mana Prabowo memasak bersama Megawati di Jalan Kebagusan, Jakarta Selatan, pada 7 Juli 2009. Namun, dalam Pilpres tersebut, pasangan Megawati-Prabowo mengalami kekalahan telak dari SBY-Boediono yang meraih 73.874.562 suara. Sejak kekalahan itu, keduanya jarang terlihat bersama lagi.

Setelah Pilpres 2014, hubungan antara Megawati dan Prabowo sempat renggang. Sebab, Megawati malah mengusung Jokowi sebagai calon presiden, sementara Prabowo singkatnya berpasangan dengan Hatta Rajasa. Megawati kemudian dianggap mengkhianati perjanjian dengan Prabowo, yang membuat Prabowo merasa dikhianati dan mengungkit kembali Perjanjian Batu Tulis 2009. Dengan kemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, Prabowo dan pendukungnya memilih oposisi selama lima tahun. Sentimen akar rumput para pendukung Prabowo pun terus menggema dan menyerang kubu Jokowi. Jokowi dianggap satu paket dengan Megawati, bahkan Jokowi sampai dianggap sebagai "petugas partai" dalam tahun-tahun tersebut. Perseteruan Prabowo melawan Mega dan Jokowi terlihat dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Kali ini kubu Prabowo menjadi pemenang dengan terpilihnya Anies Baswedan, yang berpasangan dengan Sandiaga Salahudin Uno, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Pada Pilpres 2019, Megawati masih juga menjadi rival politik Prabowo, dengan menunjuk Jokowi. Namun, hal yang sama lagi-lagi terjadi, Prabowo kalah dari Jokowi dalam Pilpres tersebut. Setelah kekalahan di Pilpres tersebut, hubungan antara Prabowo dan Megawati sempat kembali hangat, ini terlihat saat mereka bertemu di arena pencak silat Asean Games 2018 pada Agustus 2019. Prabowo yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia menyambut Megawati, dengan terlebih dulu berganti mengenakan busana adat.

Megawati juga menceritakan kedekatannya dengan Prabowo dalam pidatonya di Hari Ulang Tahun ke-46 pada Januari 2019. Mega menyebut bahwa hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Isi dari pidato tersebut yaitu, "Saya bilang, saya dan Pak Prabowo berhubungan baik," Bahkan kata Megawati, orang dekat Prabowo kerap mengatakan kepadanya bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu selalu rindu nasi goreng buatannya. "Orang dekatnya Pak Prabowo bilang, dia kangen lho sama nasi goreng saya," ujar Megawati.

4.3 Implikasi sikap politik ke demokrasi

PDIP menegaskan bahwa meskipun tidak berada dalam koalisi pemerintahan, mereka akan menjalankan fungsi penyeimbang dengan memberikan kritik konstruktif demi kepentingan rakyat. Dalam sistem presidensial Indonesia yang tidak oposisi formal, peran penyeimbang ini menjadi vital untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Pengamat politik juga menyoroti bahwa jika PDIP pada akhirnya bergabung secara penuh dalam pemerintahan, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap partai politik. Masyarakat publik mengharapkan adanya kekuatan oposisi yang efektif sebagai penyeimbang kekuasaan. Jika seluruh partai besar bergabung dalam pemerintahan, fungsi kontrol dan kritik bisa melemah, dan juga berpotensi menurunkan kualitas demokrasi



dan membuka ruang praktik kekuasaan yang kurang ketat. Sikap politik PDIP yang mendukung pemerintahan Prabowo - Gibran tanpa menempatkan kader di kabinet, serta komitmen menjalankan fungsi penyeimbang, PDIP dapat membantu menjaga kualitas demokrasi melalui kontrol terhadap kekuasaan. Namun, jika pada akhirnya memilih bergabung penuh dalam pemerintahan, maka publik akan khawatir akan hilangnya kekuatan oposisi yang efektif, maka mekanisme check and balances dalam sistem politik di Indonesia akan berpotensi melemah.

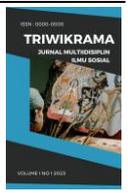
KESIMPULAN

Sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024–2029 mencerminkan strategi yang kompleks dalam merespons perubahan konstelasi kekuasaan. Sebagai partai besar yang kalah dalam pemilu, PDIP tidak memilih menjadi oposisi formal tetapi juga tidak bergabung dalam kabinet, melainkan mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang kritis namun kooperatif. Sikap ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hubungan historis antara Megawati dan Prabowo yang penuh dinamika, penolakan internal terhadap pencalonan Gibran yang dinilai kontroversial, serta tekanan dari basis pendukung yang menginginkan PDIP tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Secara lebih luas, posisi PDIP ini memiliki implikasi penting bagi sistem demokrasi Indonesia. Di satu sisi, keberadaan PDIP sebagai kekuatan penyeimbang dapat memperkuat mekanisme checks and balances melalui fungsi pengawasan di parlemen. Namun di sisi lain, sikap yang tidak sepenuhnya oposisi ini berpotensi mengurangi efektivitas kontrol terhadap pemerintah jika PDIP akhirnya memilih untuk bergabung dengan koalisi. Temuan penelitian ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi partai politik dalam menyeimbangkan kepentingan pragmatis dan ideologis, sekaligus menegaskan pentingnya peran partai dalam menjaga kualitas demokrasi melalui sikap kritis yang bertanggung jawab. Untuk itu, PDIP perlu mempertegas posisinya secara konsisten agar tidak menimbulkan ambiguitas yang dapat melemahkan perannya sebagai kontrol sosial. Pemerintah juga perlu merespons secara positif kritik konstruktif dari PDIP untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memantau perkembangan sikap PDIP seiring dengan dinamika politik selama lima tahun ke depan.

STUDI PUSTAKA

- Antara, P. A. (2019). Implementasi pengembangan karakter anak usia dini dengan pendekatan holistik. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 14(1), 17-26
- Antara News. "PDI-P expresses solid support for Prabowo-Gibran government." Diakses pada 2024.
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. Unj Press.
- Han, W. P., & SIREGAR, A. R. A. (2019). Analisis kepuasan kerja dan lingkungan kerja karyawan di Sekolah EN Mandarin–Medan. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 4(2).
- Khatibah, K. (2011). Penelitian kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 5(01), 36-39.
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan analisis data model Miles dan Huberman untuk riset akuntansi budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23-33.

- Tri, N. S. (2025). EVALUASI KINERJA 100 HARI PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN: ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NASIONAL. *LSPR Institut Komunikasi dan Bisnis*.
- Dimas, S., Ridho, A. (2024). Solidaritas Internal Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dalam Mengusung Anak Presiden di Pemilihan Walikota Surakarta 2020. *JlIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN*, 9(2), 2024.
- Yudistira, M. S. Sikap Politik Massa Pendukung Habib Rizieq Shihab (Studi Terhadap Masyarakat Kelurahan Mustika Jaya) (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Tempo.co. (2024). PDIP Perjuangan Dukung Pemerintahan Prabowo.
- Tempo.co. (2024). Peluang PDIP Jadi Oposisi atau Koalisi Terhadap Prabowo - Gibran.
- BBC Indonesia. (2024). Mengapa PDIP belum tegaskan arah politiknya meski tunjukkan isyarat jadi oposisi.
- CNN Indonesia. (2024). Potensi PDIP Oposisi Prabowo-Gibran dan Risiko Perpecahan Partai.
- Detik.com. (2024). Sikap Politik PDIP di Pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Gia Noor, S, P. (2015) SIKAP POLITIK KOALISI MERAH PUTIH TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19010/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Tri, N. S. (2025). Evaluasi Kinerja 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Kebijakan Nasional. *LSPR Institut Komunikasi dan Bisnis*. <https://elibrary.lspr.ac.id/lsprperpus/index.php?p=fstream-pdf&fid=6047&bid=9348>
- BBC Indonesia. (2024). Kalah dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi, ke mana arah politik PDIP, PKB, PKS, dan Nasdem?
- Rizky, S. M. (2025). Pengamat Politik Sebut PDIP Sulit Berkoalisi dengan Prabowo karena Gibran. Detik.com <https://www.detik.com/bali/berita/d-7860729/pengamat-politik-sebut-pdip-sulit-berkoalisi-dengan-prabowo-karena-gibran>
- Imron, W. (2025). Membaca Pertemuan Prabowo - Megawati Jelang Kongres PDIP. Detiknews <https://news.detik.com/kolom/d-7868362/membaca-pertemuan-prabowo-megawati-jelang-kongres-pdip>
- Marius, G. (2024). Sikap Terbelah PDI-P terhadap Prabowo, Mendukung atau Menjaga Jarak?. *kompasiana* <https://www.kompasiana.com/mariusgunawan/671ed9d1ed6415592b7b80a2/sikap-terbelah-pdi-p-terhadap-prabowo-mendukung-atau-menjaga-jarak>
- CNN Indonesia. (2025). Ketua PDIP Tegaskan Dukungan ke Pemerintahan Prabowo, bukan Gibran. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250315234512-32-1209278/ketua-pdip-tegaskan-dukungan-ke-pemerintahan-prabowo-bukan-gibran>
- Tempo.co. (2024). Sinyal PDIP Bergabung Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Partai Politik Tidak Bisa Diharapkan <https://www.tempo.co/politik/sinyal-pdip-bergabung-pemerintahan-prabowo-pengamat-partai-politik-tidak-bisa-diharapkan-6489>



Kompasiana.com (2024). PDIP sebagai Oposisi Tunggal terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran? <https://www.kompasiana.com/ludiro/6711f5c8c925c45a276fc4e2/pdip-sebagai-oposisi-tunggal-terhadap-pemerintahan-prabowo-gibran>